

Muhammadiyah Terus Berkomitmen Wujudkan Perdamaian Antarumat Beragama

Jum'at, 10-11-2017

JAKARTA, MUHAMMADIYAH.OR.ID – Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menandatangani nota Kesepahaman (MoU) dengan Community of Sant 'Egidio dalam rangka membangun kerjasama dan komitmen untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian antarumat beragama, Jumat (10/11).

Bertempat di aula KH Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, acara yang diawali oleh pidato sambutan dari mantan Wakil Presiden RI ke 6 Tri Sutrisno itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahniel Anzar, dan sejumlah tokoh lintas agama.

Ketua komunitas Katolik Sant 'Egidio, Professor Marco Impagliazzo menyatakan sangat mengapresiasi kerjasama ini dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

"Kami sangat senang dapat membaharui kerjasama ini", tuturnya.

Menurut Marco, Indonesia secara umum dan khususnya Muhammadiyah memiliki komitmen yang kuat pada toleransi dan keberagaman.

"Kita memiliki tantangan yang besar. Fundamentalisme fanatis sebagai akar yang menghambat perdamaian. Ia mewujud dalam kebencian dan ketidakpedulian. Kita membutuhkan upaya saling memahami", tegasnya.

Senada dengan Marco, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa kita sebenarnya memiliki harapan yang besar dengan tantangan yang juga besar. Anak-anak sebagai aset bagi perubahan harus dikawal. Untuk mewujudkan perdamaian antar kebudayaan dan umat beragama, dia mengajak kekuatan moderat untuk bergerak secara progresif dan dinamis untuk bersama-sama mengisi ruang yang negatif.

Menurutnya, tantangan sebenarnya yang menghambat upaya perdamaian bukan hanya dari sisa sentimen perang global Perang Dunia 1 dan 2. Tetapi kemungkinan kuat karena ekspansi ekonomi global yang bekerjasama dengan agen domestik yang tidak peduli pada agenda perdamaian.

Haedar berharap hal-hal tersebut menjadi perhatian seluruh elemen pemerintah agar menjadikan tujuan perdamaian dan keselarasan sebagai asas dalam segala kebijakan. Sebab menurut Haidar, usaha mewujudkan perdamaian dan anti kekerasan hanya bisa dilakukan dengan cara pendekatan yang moderat.

"Cara-cara ekstrimisme hanya akan melahirkan ekstrimisme lainnya", tegasnya.

Dalam kaitannya pada posisi ini, sejatinya Muhammadiyah merupakan organisasi yang paling berkomitmen dalam mewujudkan keselarasan dan perdamaian. Muhammadiyah, tegasnya adalah satu-satunya organisasi yang memiliki dokumen fisik yang berisi tentang kesadaran politik dan komitmen menjadikan Pancasila sebagai pusaka negara yang diwujudkan dalam konsep 'dar al-'ahdi wa al-syahadah.'

Dengan adanya konsep tersebut, predikat Indonesia sebagai negara Pancasila menuntut agar semua pihak dan perangkatnya harus berpijak pada filosofi pancasila. Kedua, sebagai komitmen Indonesia sebagai 'Dar al-'Ahdī' menuntut tidak boleh adanya ideologi lain selain Pancasila (sekulerisme, negara agama, maupun komunisme).

Lebih lanjut Haedar, semangat dalam Pancasila adalah mengayomi segala macam perbedaan dalam satu kesatuan. "Indonesia lahir karena diperjuangkan secara bersama-sama oleh berbagai golongan dan agama. Akan tetapi, 'Dar al-'Ahdī' harus disertai 'al-Syahadah', yakni upaya yang progresif dan berkemajuan sebab dengannya akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju", tutup Haedar. **(Afandi Satya)**